



Received: December 2025

Accepted: December 2025

Published: August 2026

## DETERMINASI SKOR CSA PERUSAHAAN BEI DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PAJAK KARBON DI INDONESIA

**Vaizal Asy'ari<sup>1</sup>, Andrik Aprilyanto Setiawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Trisakti, Indonesia

Email: vaiz.asyari@gmail.com<sup>1</sup>, andrikas@goufpublisher.com<sup>2</sup>

### Abstract:

*The implementation of carbon tax policy in Indonesia has created a new institutional environment that increases regulatory, reputational, and transparency pressures on companies, particularly in relation to sustainability disclosure and practices. This study aims to analyze the determinants of Corporate Sustainability Assessment (CSA) scores of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) within the context of carbon tax policy, focusing on corporate performance and firm characteristics as representations of internal capacity to respond to environmental policy pressures. The scope of this study covers cross-sectoral listed companies assessed by S&P Global CSA. This study employs a quantitative explanatory approach using secondary data derived from companies' financial statements for the 2023–2024 period and CSA scores published by S&P Global in 2025. The empirical analysis is conducted using the Ordinary Least Squares (OLS) method after all classical assumption tests, normality, multicollinearity, and heteroskedasticity are satisfied. The results indicate that firm size, measured by the natural logarithm of total assets, has a positive and statistically significant effect on CSA scores. In contrast, profitability indicators proxied by Return on Assets and Net Profit Margin, as well as capital structure measured by the Debt-to-Equity Ratio, do not show a significant effect. These findings suggest that corporate responses to environmental policy pressures are more strongly influenced by firms resource capacity and public visibility rather than short-term financial performance. This study concludes that carbon tax policy indirectly encourages higher sustainability practices and disclosures, particularly among large firms. The findings provide policy implications that the effectiveness of carbon tax implementation should be supported by integration with ESG reporting frameworks and differentiated policy approaches that account for firms' heterogeneous capacities.*

**Keywords:** Carbon Tax, CSA, Environmental Disclosure, ESG

### Abstrak:

Penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia membentuk lingkungan institusional baru yang meningkatkan tekanan regulatif, reputasional, dan transparansi terhadap perusahaan, khususnya dalam konteks pengungkapan dan praktik keberlanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam konteks kebijakan pajak karbon, dengan menekankan peran kinerja dan karakteristik perusahaan sebagai representasi kapasitas internal dalam merespons tekanan kebijakan lingkungan. Ruang lingkup kajian difokuskan pada perusahaan lintas sektor industri yang memperoleh penilaian CSA S&P Global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan BEI periode 2023–2024 dan skor CSA S&P Global tahun 2025. Estimasi dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor CSA. Sebaliknya, variabel profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Assets dan Net Profit Margin, serta struktur permodalan yang diukur melalui Debt to Equity Ratio, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap skor CSA. Temuan ini mengindikasikan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan kebijakan lingkungan lebih ditentukan oleh kapasitas sumber daya dan tingkat visibilitas perusahaan dibandingkan kinerja keuangan jangka pendek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pajak karbon berpotensi mendorong peningkatan praktik dan pengungkapan keberlanjutan secara tidak langsung, terutama pada perusahaan berskala besar. Hasil penelitian memberikan implikasi kebijakan bahwa efektivitas pajak karbon perlu didukung oleh integrasi dengan kerangka pelaporan ESG dan pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan heterogenitas kapasitas perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak Karbon, CSA, Pengungkapan Lingkungan, ESG

---

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon telah menjadi isu strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama akibat kontribusi signifikan sektor industri dan energi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari instrumen kebijakan yang mampu menginternalisasi dampak lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi. Salah satu instrumen yang mulai dikembangkan adalah pajak karbon, yang dirancang untuk memberikan sinyal harga terhadap aktivitas beremisi tinggi sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan (Sulistiyanti & Falikhatun, 2024). Dengan demikian, pajak karbon tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan dampak lingkungan jangka panjang.

Sebagai instrumen fiskal, pajak karbon memiliki implikasi yang lebih luas terhadap tata kelola perusahaan, khususnya dalam meningkatkan tekanan regulatif dan tuntutan transparansi lingkungan. Tekanan regulasi tersebut mendorong perusahaan untuk tidak

hanya menyesuaikan aktivitas operasional, tetapi juga memperkuat praktik pelaporan dan pengungkapan lingkungan kepada publik. Peningkatan regulasi lingkungan berhubungan positif dengan kecenderungan perusahaan dalam menyampaikan informasi lingkungan secara lebih komprehensif sebagai bentuk respons terhadap tuntutan eksternal (Indri L. L. et al., 2023). Perusahaan publik juga cenderung meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan ketika berada dalam lingkungan regulasi yang lebih ketat (Susanti & Hindasah, 2025).

Komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim semakin diperkuat melalui kebijakan fiskal yang membuka ruang bagi penerapan pajak karbon. Meskipun implementasi pajak karbon di Indonesia masih dilakukan secara bertahap, keberadaan regulasi ini telah membentuk lingkungan institusional baru bagi perusahaan, khususnya perusahaan terbuka yang berada di bawah pengawasan regulator pasar modal. Lingkungan regulasi tersebut meningkatkan perhatian regulator dan investor terhadap kinerja lingkungan dan praktik keberlanjutan perusahaan (Athaya et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pajak karbon berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan tidak hanya melalui aspek biaya, tetapi juga melalui tekanan reputasi dan kepatuhan.

Pengungkapan lingkungan perusahaan menjadi elemen penting dalam konteks meningkatnya tuntutan akuntabilitas lingkungan. Melalui pengungkapan lingkungan, perusahaan dapat menyampaikan informasi terkait dampak lingkungan, strategi mitigasi risiko iklim, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar dan profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang lebih baik, karena memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengelola dan melaporkan informasi keberlanjutan (Wulandhari & Machdar, 2024). Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Hartono, Lasmini, & Fatihah, 2025) yang menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan berperan penting dalam menentukan kualitas pengungkapan lingkungan.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, isu keberlanjutan semakin memperoleh perhatian melalui berkembangnya penilaian Environmental, Social, and Governance (ESG) oleh lembaga independen. Penilaian ESG digunakan oleh investor sebagai dasar untuk menilai risiko non-keuangan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan (Gustanto & Risman, 2025). Salah satu instrumen penilaian yang digunakan secara luas adalah Corporate Sustainability Assessment (CSA), yang menilai kualitas pengelolaan serta pengungkapan keberlanjutan perusahaan berdasarkan isu ESG yang material. Skor CSA berfungsi sebagai sinyal reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata investor global, sekaligus mencerminkan tingkat kesiapan perusahaan dalam merespons tuntutan keberlanjutan (Mubarok & Widianingsih, 2025).

Pajak karbon sebagai kebijakan lingkungan yang relatif baru berpotensi menjadi faktor institusional yang memengaruhi strategi pelaporan perusahaan. Dalam konteks kebijakan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan karakteristik dan kinerja keuangan perusahaan periode 2023–2024 sebagai proksi kapasitas internal perusahaan dalam merespons tekanan kebijakan lingkungan. Skor CSA tahun 2025 digunakan sebagai proksi penilaian eksternal atas kualitas pengelolaan dan pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur kebijakan lingkungan dan pelaporan keberlanjutan, serta menjadi rujukan bagi regulator dan pelaku pasar modal dalam mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

### **Legitimacy Theory**

Legitimacy theory berpijak pada asumsi bahwa perusahaan beroperasi berdasarkan suatu social contract dengan masyarakat, di mana keberlangsungan perusahaan bergantung pada sejauh mana aktivitas dan outputnya dianggap sesuai dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial yang berlaku (Suchman, 1995). Ketika terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dan ekspektasi masyarakat, perusahaan menghadapi risiko kehilangan legitimasi sosial yang dapat berdampak pada reputasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan operasional. Dalam konteks kebijakan lingkungan, regulasi seperti pajak karbon merepresentasikan perubahan ekspektasi sosial dan regulatif terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk menyesuaikan perilaku dan strategi komunikasinya guna mempertahankan legitimasi di mata publik dan regulator.

Dalam kerangka legitimacy theory, pengungkapan lingkungan dipandang sebagai salah satu strategi utama perusahaan untuk memperoleh, mempertahankan, atau memulihkan legitimasi sosial. Pengungkapan tersebut memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, komitmen terhadap pengelolaan dampak lingkungan, serta keselarasan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Deegan, 2002). Ketika terjadi perubahan lingkungan institusional, seperti penerapan kebijakan lingkungan berbasis fiskal, perusahaan cenderung menyesuaikan isi, intensitas, dan narasi pengungkapan lingkungan sebagai respons terhadap tekanan legitimasi, baik dalam bentuk kepatuhan simbolik maupun tindakan yang lebih substantif. Tekanan institusional dan regulatif mendorong perusahaan untuk menggunakan pengungkapan lingkungan sebagai sarana pembungkahan citra dan justifikasi keberlanjutan aktivitas bisnisnya di hadapan publik dan regulator (Wahyudi, 2017).

Penerapan kebijakan pajak karbon membentuk tekanan legitimasi baru bagi perusahaan, khususnya perusahaan terbuka yang berada dalam sorotan publik dan pasar modal. Pajak karbon merepresentasikan ekspektasi negara dan masyarakat terhadap kontribusi perusahaan dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, peningkatan pengungkapan lingkungan yang tercermin dalam penilaian keberlanjutan seperti Corporate Sustainability Assessment (CSA) dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk menunjukkan keselarasan dengan kebijakan lingkungan nasional dan norma global keberlanjutan. Perspektif legitimacy theory ini memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan mengapa perusahaan dengan kapasitas sumber daya yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan sebagai respons terhadap kebijakan pajak karbon.

### **Stakeholders Theory**

Stakeholder Theory menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain yang memiliki hubungan signifikan dengan operasi dan dampak perusahaan, seperti investor, regulator, konsumen, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya (Putri & Lismawati, 2024). Dalam konteks pengungkapan lingkungan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang menghadapi tekanan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan cenderung meningkatkan transparansi laporan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan ekspektasi para pihak tersebut. Tekanan tersebut menjadikan pengungkapan lingkungan sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan hubungan perusahaan dengan stakeholder utama (Putri & Lismawati, 2024).

Tekanan dari stakeholder eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah telah terbukti memengaruhi praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan. Studi empiris menunjukkan bahwa stakeholder pressure, termasuk dari pemerintah dan pelanggan, memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan, di mana perusahaan yang merasakan tekanan lebih kuat dari kedua kelompok ini cenderung menghasilkan laporan yang lebih lengkap dan informatif (Sulemana, Cheng, Agyemang, Osei, & Nagriwum, 2025). Temuan ini mendukung gagasan bahwa pengungkapan lingkungan bukan sekadar aktivitas pelaporan pasif, tetapi merupakan bentuk interaksi aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan beragam terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

Dalam kerangka pasar modal yang semakin memperhatikan isu keberlanjutan, pengungkapan ESG yang berkualitas berfungsi sebagai media komunikasi utama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan publik. Pengungkapan ESG yang transparan dan akurat memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengelola risiko dan peluang

keberlanjutan yang bersifat material, khususnya terkait dampak lingkungan dan kebijakan iklim. Kualitas pengungkapan ESG yang tinggi meningkatkan kepercayaan investor karena mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan (Pasaribu & Soeratin, 2024). Pengungkapan lingkungan tidak hanya membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan non-keuangan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Oleh karena itu, stakeholder theory memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan motivasi perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan lingkungan sebagai respons terhadap tekanan dan ekspektasi stakeholder, terutama ketika perusahaan beroperasi dalam rezim kebijakan lingkungan baru seperti pajak karbon, dan menghadapi tuntutan keberlanjutan pasar modal.

### **Pengembangan Hipotesis**

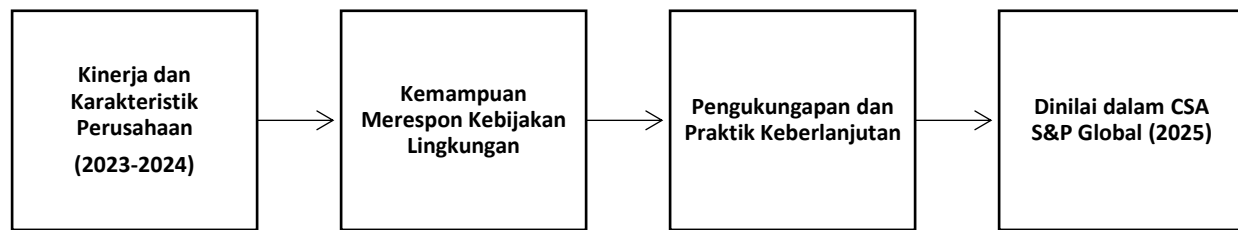
Berdasarkan legitimacy theory dan stakeholder theory, tekanan kebijakan lingkungan (termasuk pajak karbon) membentuk konteks institusional yang meningkatkan ekspektasi transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dalam konteks tersebut, variasi respons pengungkapan keberlanjutan yang tercermin dalam skor CSA diperkirakan dipengaruhi oleh kapasitas internal perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji hipotesis bahwa karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan (LN\_ASSETS), kinerja profitabilitas (ROA dan NPM) dan struktur permodalan (DER) berpengaruh terhadap skor CSA perusahaan BEI dalam konteks kebijakan pajak karbon di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan empiris antara kinerja dan karakteristik perusahaan sebagai representasi kapasitas internal dalam merespons tekanan kebijakan lingkungan, termasuk pajak karbon, terhadap pengungkapan dan praktik keberlanjutan perusahaan yang tercermin dalam Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal secara objektif melalui analisis statistik berbasis data numerik dan inferensial (Sekaran & Bougie, 2016).

Penelitian ini memposisikan kinerja dan karakteristik perusahaan periode 2023–2024 sebagai indikator kapasitas internal perusahaan dalam merespons kebijakan lingkungan. Karakteristik tersebut mencerminkan sumber daya finansial, struktur permodalan, dan tingkat profitabilitas yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan strategi operasional serta pelaporan keberlanjutan. Respons perusahaan terhadap tekanan kebijakan lingkungan tersebut selanjutnya tercermin dalam praktik

pengungkapan keberlanjutan, yang dinilai secara eksternal melalui skor CSA S&P Global tahun 2025. Hubungan konseptual antarvariabel penelitian ini disajikan pada Gambar 1 sebagai kerangka konseptual penelitian.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbagai sektor industri, termasuk sektor keuangan dan non-keuangan. Pemilihan cakupan lintas sektor dilakukan untuk menangkap variasi karakteristik perusahaan dan respons keberlanjutan dalam konteks penilaian Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global yang bersifat lintas industri. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar di BEI, memiliki data keuangan yang lengkap selama periode 2023–2024, serta memperoleh skor CSA S&P Global tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan kesesuaian data dengan tujuan penelitian dan menjaga validitas inferensi empiris (Sugiyono, 2019), dalam menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan dan basis data pasar modal, serta publikasi resmi S&P Global ESG Scores dan Corporate Sustainability Assessment (CSA). Data keuangan perusahaan diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia dalam bentuk Financial Data & Ratio, yang mencakup informasi total aset, profitabilitas, dan struktur permodalan perusahaan. Sementara itu, data pengungkapan lingkungan diperoleh dari skor CSA S&P Global tahun 2025, yang merefleksikan kualitas pengelolaan dan pengungkapan isu keberlanjutan yang bersifat material. Penggunaan data sekunder dalam penelitian bisnis dan akuntansi lazim dilakukan karena memungkinkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat diverifikasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti empiris (Sekaran & Bougie, 2016).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan lingkungan perusahaan, yang diproksikan menggunakan skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global tahun 2025. Skor CSA merepresentasikan kualitas pengelolaan dan pengungkapan isu keberlanjutan yang material, khususnya aspek lingkungan, berdasarkan penilaian terstandarisasi internasional. CSA dipilih karena mencerminkan

persepsi investor dan pemangku kepentingan global terhadap praktik keberlanjutan perusahaan, serta relevan dalam konteks tekanan regulatif, reputasi, dan kebijakan iklim (S&P Global, 2025).

Variabel independen merepresentasikan kinerja dan karakteristik perusahaan, yang dihitung berdasarkan rata-rata data keuangan tahun 2023–2024. Variabel tersebut meliputi ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset (LN\_ASSETS), profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM), serta struktur permodalan yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER). Penggunaan nilai rata-rata dua tahun bertujuan untuk menangkap kondisi finansial perusahaan yang relatif stabil, mengurangi volatilitas tahunan, serta menjaga urutan waktu kausal antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan..

Penelitian ini menerapkan lagged outcome design, di mana variabel independen diukur pada periode sebelum variabel dependen. Dalam desain ini, kinerja dan karakteristik perusahaan pada periode 2023–2024 diasumsikan memengaruhi tingkat pengungkapan dan praktik keberlanjutan yang dinilai melalui skor CSA pada tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk meminimalkan potensi bias simultanitas dan memperkuat inferensi kausal, yang umum diterapkan dalam studi kebijakan publik, keberlanjutan, dan pelaporan non-keuangan (Bellemare, Masaki, & Pepinsky, 2017). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan struktur temporal bertahap, di mana variabel independen diukur pada periode sebelum variabel dependen, sehingga memungkinkan inferensi kausal yang lebih kuat meskipun tanpa struktur panel time-series.

Model empiris penelitian ini dirumuskan dalam bentuk regresi linier berganda, dengan parameter diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). OLS dipilih karena sesuai untuk mengestimasi hubungan linier antarvariabel pada data cross-section, serta menghasilkan estimasi yang tidak bias dan efisien selama asumsi klasik terpenuhi (Gujarati & Porter, 2009). Spesifikasi model empiris dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CSA_i = \alpha + \beta_1 LN\_ASSETS_i + \beta_2 ROA_i + \beta_3 NPM_i + \beta_4 DER_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$CSA_i$  = skor CSA S&P Global perusahaan ke- $i$ , yang merepresentasikan kualitas pengelolaan dan pengungkapan praktik keberlanjutan perusahaan berdasarkan penilaian ESG.

$\alpha$  = konstanta model, yang menunjukkan nilai rata-rata CSA ketika seluruh variabel independen bernilai nol.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = koefisien regresi yang menggambarkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap skor CSA

$LN\_ASSETS_i$  = ukuran perusahaan ke- $i$ , yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset.

$ROA_i$  = Return on Assets perusahaan ke- $i$ , sebagai indikator profitabilitas dan efektivitas manajerial.

$NPM_i$  = Net Profit Margin perusahaan ke- $i$ , yang mencerminkan kualitas kinerja operasional perusahaan.

$DER_i$  = Debt to Equity Ratio perusahaan ke- $i$ , untuk menangkap pengaruh risiko keuangan terhadap strategi dan praktik keberlanjutan.

$\varepsilon_i$  = error term, yang merepresentasikan faktor-faktor lain di luar model yang mempengaruhi skor CSA perusahaan ke- $i$ .

Seluruh analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews, meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta estimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Estimasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan mengacu pada legitimacy theory dan stakeholder theory untuk menjelaskan peran tekanan kebijakan pajak karbon dan tuntutan pemangku kepentingan dalam membentuk strategi pengungkapan lingkungan perusahaan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis empiris dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana kinerja dan karakteristik perusahaan di Indonesia mencerminkan kapasitas internal dalam merespons tekanan kebijakan lingkungan, khususnya kebijakan pajak karbon, yang selanjutnya tercermin dalam praktik pengungkapan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan periode 2023–2024 yang dikaitkan dengan skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global tahun 2025 sebagai representasi penilaian eksternal atas kualitas pengelolaan dan pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Pendekatan analisis diawali dengan pemetaan karakteristik sampel penelitian yang mencakup perusahaan lintas sektor industri di Bursa Efek Indonesia. Pemetaan ini bertujuan untuk menggambarkan struktur sektor, variasi karakteristik keuangan, serta heterogenitas kapasitas perusahaan dalam konteks keberlanjutan. Dengan memahami distribusi sektor dan karakteristik awal data, penelitian ini dapat menempatkan hasil pengujian empiris dalam konteks industri dan lingkungan institusional yang relevan dengan implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia.

**Tabel 1. Distribusi Sektor**

| No           | Sektor                   | Jumlah Perusahaan | Persentase     |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | Basic Materials          | 10                | 13,89%         |
| 2            | Consumer Cyclical        | 9                 | 12,50%         |
| 3            | Consumer Non-Cyclical    | 9                 | 12,50%         |
| 4            | Energy                   | 10                | 13,89%         |
| 5            | Financials               | 15                | 20,83%         |
| 6            | Healthcare               | 4                 | 5,56%          |
| 7            | Industrials              | 2                 | 2,78%          |
| 8            | Infrastructures          | 6                 | 8,33%          |
| 9            | Properties & Real Estate | 4                 | 5,56%          |
| 10           | Technology               | 3                 | 4,17%          |
| <b>Total</b> |                          | <b>72</b>         | <b>100,00%</b> |

Tabel 1 menyajikan distribusi sektor dari 72 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian mencakup sepuluh sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang mencerminkan keragaman struktur industri dan karakteristik bisnis perusahaan di Indonesia. Sektor Financials merupakan sektor dengan jumlah perusahaan terbesar, yaitu sebanyak 15 perusahaan atau 20,83% dari total sampel. Dominasi sektor keuangan menunjukkan bahwa perusahaan di sektor ini relatif lebih banyak memperoleh penilaian CSA S&P Global, yang dapat dikaitkan dengan tingginya ekspektasi transparansi, tata kelola, dan praktik keberlanjutan pada industri jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan peran sektor keuangan sebagai intermediary yang berada di bawah pengawasan ketat regulator serta memiliki eksposur reputasi yang tinggi.

Sektor Basic Materials dan Energy masing-masing menyumbang 13,89% dari total sampel, dengan jumlah perusahaan yang sama, yaitu 10 perusahaan pada masing-masing sektor. Keberadaan sektor-sektor berbasis sumber daya alam ini relevan dalam konteks kebijakan pajak karbon, mengingat karakteristik operasionalnya yang cenderung intensif emisi dan memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan pada sektor ini menghadapi tekanan legitimasi dan regulasi lingkungan yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor lain. Sektor Consumer Cyclical dan

Consumer Non-Cyclicals masing-masing berkontribusi 12,50% dari total sampel. Kedua sektor ini merepresentasikan perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen akhir, sehingga tekanan dari stakeholder non-regulator, seperti konsumen dan masyarakat, berpotensi memengaruhi strategi pengungkapan keberlanjutan mereka.

Sektor lain seperti Infrastructures (8,33%), Healthcare (5,56%), Properties & Real Estate (5,56%), Technology (4,17%), dan Industrials (2,78%) memiliki proporsi yang lebih kecil. Meskipun demikian, keberadaan sektor-sektor ini memperkaya variasi karakteristik perusahaan dalam sampel dan memungkinkan analisis lintas sektor terhadap respons perusahaan terhadap tekanan kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, distribusi sektor yang beragam menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terfokus pada satu industri tertentu, melainkan mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia secara lebih komprehensif. Hal ini memperkuat generalisasi temuan penelitian dalam menjelaskan hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan yang tercermin dalam skor CSA.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

| Variabel  | Mean     | Median   | Maximum  | Minimum   | Std. Dev. |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| CSA       | 32,16667 | 30,5     | 74       | 11        | 12,74783  |
| DER       | 12,81986 | 0,8575   | 804,505  | 0,03      | 94,64238  |
| LN_ASSETS | 10,86197 | 10,74926 | 14,58546 | 6,758005  | 1,489716  |
| NPM       | 6,34167  | 14,53625 | 97,27465 | -502,0943 | 70,61775  |
| ROA       | 4,533797 | 4,28665  | 27,41535 | -108,0642 | 15,02058  |

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif variabel utama penelitian, yang meliputi skor Corporate Sustainability Assessment (CSA), Debt to Equity Ratio (DER), ukuran perusahaan (LN\_ASSETS), Net Profit Margin (NPM), dan Return on Assets (ROA). Nilai rata-rata CSA sebesar 32,17 dengan median 30,5 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengungkapan dan praktik keberlanjutan perusahaan sampel berada pada kategori menengah. Rentang skor CSA yang cukup lebar, dari nilai minimum 11 hingga maksimum 74, mencerminkan adanya variasi yang signifikan antarperusahaan dalam mengelola dan mengungkapkan isu keberlanjutan. Standar deviasi sebesar 12,75 memperkuat indikasi heterogenitas praktik keberlanjutan lintas sektor dan perusahaan.

Variabel DER memiliki nilai rata-rata 12,82, namun dengan median yang jauh lebih rendah yaitu 0,86, serta nilai maksimum yang sangat tinggi (804,51). Perbedaan yang mencolok antara mean dan median, serta standar deviasi yang besar (94,64),

mengindikasikan distribusi DER yang sangat skewed. Hal ini mencerminkan adanya beberapa perusahaan dengan tingkat leverage yang sangat tinggi, sementara sebagian besar perusahaan lainnya memiliki struktur permodalan yang relatif moderat. Kondisi ini umum ditemukan pada sampel lintas sektor, khususnya ketika sektor keuangan dan sektor dengan struktur pembiayaan khusus ikut disertakan. Ukuran perusahaan yang diukur melalui LN\_ASSETS menunjukkan nilai rata-rata 10,86 dengan standar deviasi 1,49, yang mengindikasikan variasi ukuran perusahaan yang cukup moderat. Rentang nilai dari 6,76 hingga 14,59 mencerminkan keberadaan perusahaan dengan skala aset yang sangat kecil hingga sangat besar dalam sampel. Variasi ukuran ini relevan untuk menguji peran kapasitas sumber daya perusahaan dalam merespons tuntutan keberlanjutan dan kebijakan lingkungan.

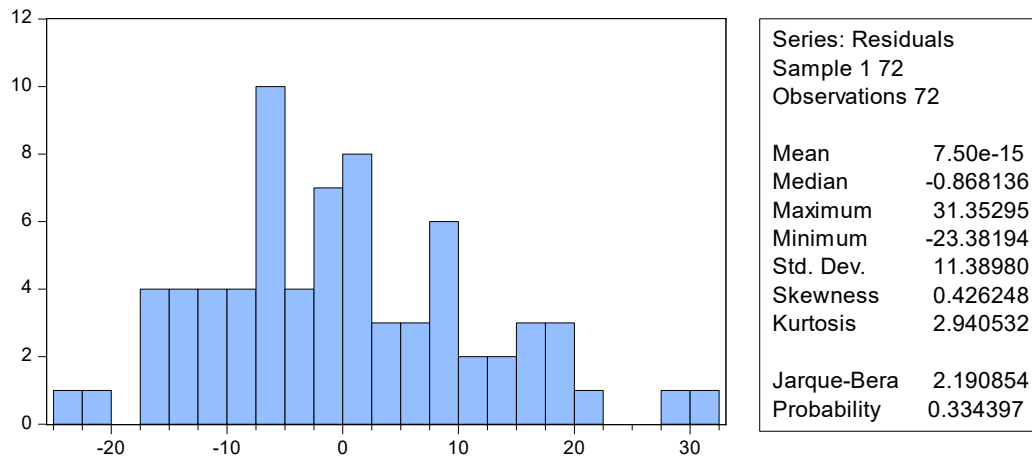
Variabel profitabilitas menunjukkan pola yang relatif heterogen. NPM memiliki nilai rata-rata 6,34, tetapi median yang lebih tinggi (14,54) serta nilai minimum yang sangat rendah (-502,09) dan maksimum yang tinggi (97,27). Pola ini menunjukkan adanya perusahaan dengan kinerja operasional yang sangat baik, sekaligus perusahaan yang mengalami tekanan profitabilitas signifikan. Standar deviasi yang besar (70,62) mengindikasikan volatilitas kinerja operasional antarperusahaan. Sementara itu, ROA memiliki nilai rata-rata 4,53 dengan median 4,29, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, meskipun dengan tingkat efisiensi yang bervariasi. Nilai minimum -108,06 dan maksimum 27,42, serta standar deviasi 15,02, kembali menegaskan heterogenitas kinerja keuangan dalam sampel penelitian.

Secara keseluruhan, statistik deskriptif menunjukkan bahwa data penelitian memiliki variasi yang cukup besar antarperusahaan dan sektor. Variasi ini mendukung penggunaan pendekatan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap skor CSA, serta relevan untuk dianalisis dalam kerangka legitimacy theory dan stakeholder theory, di mana perbedaan kapasitas sumber daya dan tekanan eksternal dapat menghasilkan respons keberlanjutan yang berbeda-beda.

### **Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model empiris yang diestimasi memenuhi prasyarat statistik yang diperlukan sebelum hasil estimasi regresi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) diinterpretasikan. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menjamin bahwa estimasi parameter regresi bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten, sehingga hasil pengujian statistik dapat diinterpretasikan secara valid (Gujarati & Porter, 2009). Pada data cross-sectional, uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas residual dilakukan untuk menilai apakah distribusi residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Asumsi normalitas residual penting terutama untuk memastikan keabsahan uji statistik t dan uji F dalam kerangka OLS, khususnya pada ukuran sampel terbatas (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan pendekatan Jarque-Bera, yang menguji kesesuaian distribusi residual berdasarkan nilai skewness dan kurtosis. Hasil uji normalitas residual disajikan pada Gambar 2, yang menampilkan histogram residual beserta nilai statistik Jarque-Bera dan probabilitasnya.



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Residual**

Berdasarkan Gambar 2, histogram residual menunjukkan pola distribusi yang relatif simetris di sekitar nilai nol, yang mengindikasikan tidak adanya penyimpangan ekstrem dari distribusi normal. Secara statistik, hasil uji Jarque-Bera menghasilkan nilai sebesar 2,190854 dengan nilai probabilitas 0,334397, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Residual dalam model regresi penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas yang bertujuan untuk memastikan tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi dan memperbesar varians estimasi. Multikolinearitas diuji menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), di mana nilai VIF yang berada di bawah ambang batas umum menunjukkan bahwa model regresi bebas dari permasalahan multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2009).

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variabel | VIF     |
|----------|---------|
| DER      | 1,03759 |

|           |          |
|-----------|----------|
| LN_ASSETS | 1,310412 |
| NPM       | 5,26007  |
| ROA       | 5,345147 |

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) terpusat (centered VIF) yang berada di bawah batas kritis 10. Variabel DER dan LN\_ASSETS masing-masing memiliki nilai VIF sebesar 1,04 dan 1,31, yang mengindikasikan tidak adanya korelasi linear yang kuat dengan variabel independen lainnya. Sementara itu, variabel profitabilitas NPM dan ROA memiliki nilai VIF masing-masing sebesar 5,26 dan 5,35, yang masih berada dalam batas toleransi dan dapat diterima dalam model regresi. Model empiris penelitian ini tidak mengalami permasalahan multikolinearitas yang signifikan, sehingga estimasi koefisien regresi OLS dapat diinterpretasikan secara reliabel.

Setelah model regresi dinyatakan bebas dari permasalahan multikolinearitas, pengujian asumsi klasik dilanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan, sehingga estimasi parameter regresi yang dihasilkan oleh metode Ordinary Least Squares (OLS) tetap efisien dan valid. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey test, yang umum digunakan pada data cross-sectional untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual (Gujarati & Porter, 2009).

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Statistik Uji       | Nilai    | Probabilitas |
|---------------------|----------|--------------|
| F-statistic         | 0,969747 | 0,43         |
| Obs*R-squared       | 3,940338 | 0,4141       |
| Scaled explained SS | 3,310617 | 0,5073       |

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk F-statistic sebesar 0,4300, Obs\*R-squared sebesar 0,4141, dan Scaled explained SS sebesar 0,5073, yang seluruhnya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol homoskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat konstan dan model

empiris penelitian ini bebas dari permasalahan heteroskedastisitas. Secara keseluruhan, hasil uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik yang dipersyaratkan, sehingga layak diestimasi dan diinterpretasikan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS).

### Hasil Estimasi Ordinary Least Squares

Setelah model empiris dinyatakan memenuhi seluruh asumsi klasik, tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi regresi linier berganda menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Estimasi ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan dan praktik keberlanjutan perusahaan yang diproksikan dengan skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global. Hasil estimasi regresi OLS disajikan pada Tabel 5 dan dianalisis berdasarkan arah koefisien regresi, tingkat signifikansi statistik, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi skor CSA perusahaan.

**Tabel 5. Hasil Estimasi Ordinary Least Squares**

| <b>Variable</b>        | <b>Coefficient</b> | <b>Std. Error</b> | <b>t-Statistic</b> | <b>Prob.</b> |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Konstanta              | -15,0359           | 12,04818          | -1,247981          | 0,2164       |
| DER                    | -0,00076           | 0,014976          | -0,050752          | 0,9597       |
| LN_ASSETS              | 4,273698           | 1,06925           | 3,996914           | 0,0002       |
| NPM                    | -0,062773          | 0,045192          | -1,389028          | 0,1694       |
| ROA                    | 0,262384           | 0,214176          | 1,225085           | 0,2248       |
| <b>Statistik Model</b> | <b>Nilai</b>       |                   |                    |              |
| R-squared              | 0,201711           |                   |                    |              |
| Adjusted R-squared     | 0,154052           |                   |                    |              |
| F-statistic            | 4,232386           |                   |                    |              |
| Prob(F-statistic)      | 0,004093           |                   |                    |              |
| Jumlah observasi       | 72                 |                   |                    |              |

Berdasarkan hasil estimasi regresi OLS pada Tabel 5, ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset (LN\_ASSETS) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap skor CSA. Koefisien sebesar 4,2737 dengan tingkat signifikansi 1% mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala aset yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengungkapan dan praktik keberlanjutan yang lebih tinggi. Temuan ini

menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk merespons tuntutan kebijakan lingkungan dan ekspektasi keberlanjutan secara lebih intensif.

Sementara itu, variabel profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap skor CSA. Meskipun ROA memiliki koefisien positif dan NPM memiliki koefisien negatif, keduanya tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan belum menjadi faktor penentu utama dalam variasi praktik pengungkapan keberlanjutan yang tercermin dalam skor CSA. Variabel struktur permodalan yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap skor CSA. Koefisien DER yang mendekati nol dan tidak signifikan mengindikasikan bahwa tingkat leverage perusahaan tidak secara langsung memengaruhi strategi pengungkapan dan praktik keberlanjutan dalam konteks penilaian CSA.

Secara keseluruhan, nilai F-statistic sebesar 4,2324 dengan probabilitas 0,0041 menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,1541 menunjukkan bahwa sekitar 15,41% variasi skor CSA dapat dijelaskan oleh kinerja dan karakteristik perusahaan yang digunakan dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

### **Temuan Penelitian**

Hasil estimasi regresi Ordinary Least Squares (OLS) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan melalui logaritma natural total aset (LN\_ASSETS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala aset yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengungkapan dan praktik keberlanjutan yang lebih tinggi. Secara empiris, hasil ini menegaskan bahwa kapasitas internal perusahaan yang tercermin dari besarnya sumber daya finansial, infrastruktur organisasi, serta kemampuan manajerial memegang peranan penting dalam merespons tuntutan kebijakan lingkungan dan agenda keberlanjutan. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem tata kelola yang lebih mapan, sumber daya manusia khusus di bidang keberlanjutan, serta kemampuan untuk mengintegrasikan isu ESG ke dalam strategi bisnis dan pelaporan korporasi, sehingga memperoleh penilaian CSA yang lebih baik.

Dari perspektif legitimacy theory, signifikannya pengaruh ukuran perusahaan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tingginya tekanan legitimasi yang dihadapi perusahaan berskala besar. Perusahaan dengan aset besar berada dalam sorotan publik,

regulator, dan media yang lebih intensif, sehingga lebih rentan terhadap risiko legitimasi ketika tidak mampu menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi sosial yang berkembang, termasuk terkait kebijakan lingkungan seperti pajak karbon. Dalam konteks ini, pengungkapan dan praktik keberlanjutan yang dinilai melalui CSA berfungsi sebagai mekanisme legitimasi untuk menunjukkan keselarasan antara aktivitas perusahaan dan nilai-nilai keberlanjutan yang diharapkan oleh masyarakat dan negara. Dengan demikian, peningkatan skor CSA pada perusahaan besar mencerminkan strategi perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat legitimasi sosialnya di tengah perubahan lingkungan institusional.

Selaras dengan stakeholder theory, ukuran perusahaan juga berkaitan erat dengan tingkat stakeholder visibility dan kompleksitas tuntutan pemangku kepentingan. Perusahaan besar umumnya memiliki basis pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk investor institusional, kreditor internasional, regulator pasar modal, dan masyarakat global, yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas ESG. Dalam kondisi tersebut, skor CSA berperan sebagai reputational signal yang penting, khususnya di pasar modal yang semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan. Perusahaan dengan aset besar memiliki insentif yang lebih kuat untuk memperoleh dan mempertahankan reputasi keberlanjutan yang baik melalui peningkatan kualitas pengungkapan dan praktik ESG, sehingga lebih aktif dalam memenuhi kriteria penilaian CSA S&P Global.

Sebaliknya, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap skor CSA. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja laba jangka pendek bukan merupakan faktor utama yang menentukan variasi kualitas pengungkapan dan praktik keberlanjutan perusahaan. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik CSA yang menilai aspek keberlanjutan secara komprehensif dan struktural, seperti kebijakan, tata kelola, manajemen risiko, dan konsistensi implementasi ESG, yang tidak selalu bergerak searah dengan fluktuasi profitabilitas tahunan. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi belum tentu secara otomatis memiliki praktik keberlanjutan yang lebih baik, dan sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang lebih rendah masih dapat menunjukkan komitmen keberlanjutan yang kuat melalui kebijakan dan tata kelola yang memadai.

Demikian pula, struktur permodalan yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap skor CSA. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat leverage perusahaan tidak secara langsung memengaruhi strategi pengungkapan dan praktik keberlanjutan yang dinilai dalam CSA. Dalam konteks pasar modal Indonesia yang heterogen lintas sektor, keputusan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan tampaknya lebih dipengaruhi oleh

tekanan institusional dan reputasi dibandingkan pertimbangan risiko keuangan jangka pendek. Selain itu, kreditor dan investor mungkin belum secara seragam menjadikan leverage sebagai dasar utama dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan, sehingga hubungan antara DER dan CSA menjadi tidak signifikan secara empiris.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan kebijakan lingkungan, termasuk pajak karbon, lebih tercermin melalui dimensi kapasitas dan visibilitas perusahaan daripada melalui indikator kinerja keuangan jangka pendek. Skor CSA sebagai penilaian ESG eksternal berfungsi sebagai sinyal reputasi dan legitimasi yang terutama relevan bagi perusahaan besar yang berada dalam pengawasan intensif pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks kebijakan lingkungan yang semakin menguat, ukuran perusahaan menjadi faktor kunci dalam membentuk strategi pengungkapan dan praktik keberlanjutan perusahaan di Indonesia, sementara profitabilitas dan struktur permodalan berperan lebih terbatas.

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa karakteristik perusahaan memengaruhi skor CSA didukung secara parsial, di mana hanya ukuran perusahaan (LN\_ASSETS) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap skor CSA, sedangkan ROA, NPM, dan DER tidak signifikan. Dukungan empiris tersebut terutama tercermin melalui peran signifikan ukuran perusahaan sebagai proksi kapasitas internal dalam merespons tekanan kebijakan lingkungan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan seperti pajak karbon lebih efektif memengaruhi praktik pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan yang memiliki sumber daya dan visibilitas publik yang lebih besar, sementara faktor kinerja keuangan jangka pendek belum menjadi determinan utama dalam respons keberlanjutan perusahaan.

### **Implikasi Kebijakan Pajak Karbon**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan dan implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia. Signifikannya pengaruh ukuran perusahaan terhadap skor CSA menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala aset besar lebih responsif terhadap tekanan kebijakan lingkungan dan tuntutan keberlanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon berpotensi lebih efektif dalam mendorong peningkatan transparansi dan praktik keberlanjutan pada perusahaan besar yang memiliki kapasitas sumber daya dan visibilitas publik yang tinggi.

Tidak signifikannya pengaruh profitabilitas dan struktur permodalan mengindikasikan bahwa kebijakan pajak karbon belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pertimbangan strategis oleh seluruh kelompok perusahaan, khususnya perusahaan berskala menengah dan kecil. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih diferensiatif, seperti pemberian insentif fiskal, pendampingan teknis, atau skema transisi bagi

perusahaan dengan kapasitas sumber daya terbatas, agar kebijakan pajak karbon tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih luas.

Selain itu, penggunaan skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) sebagai indikator pengungkapan keberlanjutan menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan akan semakin efektif apabila dikaitkan dengan mekanisme reputasi dan pasar modal. Integrasi kebijakan pajak karbon dengan kerangka pelaporan ESG dan penilaian keberlanjutan dapat memperkuat sinyal kebijakan kepada pelaku usaha dan investor, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengungkapan lingkungan secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja dan karakteristik perusahaan sebagai representasi kapasitas internal memengaruhi tingkat pengungkapan dan praktik keberlanjutan perusahaan di Indonesia dalam konteks kebijakan pajak karbon, yang diproksikan melalui skor Corporate Sustainability Assessment (CSA) S&P Global. Dengan menggunakan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2024 dan skor CSA tahun 2025, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai determinasi skor CSA perusahaan dalam lingkungan kebijakan lingkungan yang semakin menguat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor CSA. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala aset yang lebih besar memiliki kapasitas sumber daya, visibilitas publik, dan tekanan institusional yang lebih tinggi, sehingga lebih responsif dalam meningkatkan kualitas pengungkapan dan praktik keberlanjutan. Sebaliknya, variabel profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Assets dan Net Profit Margin, serta struktur permodalan yang diukur melalui Debt to Equity Ratio, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap skor CSA. Hal ini mengisyaratkan bahwa kinerja keuangan jangka pendek dan tingkat leverage belum menjadi determinan utama dalam pembentukan kualitas praktik keberlanjutan yang dinilai secara eksternal melalui CSA.

Temuan tersebut menegaskan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan kebijakan lingkungan, termasuk kebijakan pajak karbon, lebih tercermin melalui dimensi kapasitas dan visibilitas perusahaan dibandingkan melalui indikator kinerja keuangan jangka pendek. Dari perspektif legitimacy theory, perusahaan berskala besar cenderung meningkatkan pengungkapan keberlanjutan sebagai strategi untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasi sosial di tengah meningkatnya tuntutan regulatif dan

ekspektasi publik terkait isu lingkungan. Selaras dengan stakeholder theory, perusahaan dengan aset besar menghadapi tekanan yang lebih kompleks dari investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga memiliki insentif yang lebih kuat untuk memperoleh reputasi keberlanjutan yang baik melalui pemenuhan standar penilaian seperti CSA.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon berpotensi memengaruhi praktik pengungkapan keberlanjutan perusahaan secara tidak langsung melalui mekanisme tekanan institusional dan reputasi pasar, khususnya pada perusahaan dengan kapasitas sumber daya yang lebih besar. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa tekanan kebijakan lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan didukung secara parsial, terutama melalui peran signifikan ukuran perusahaan sebagai proksi kapasitas internal dalam merespons kebijakan tersebut.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pajak karbon dalam mendorong praktik keberlanjutan perusahaan akan lebih optimal apabila disertai dengan pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan kapasitas antarperusahaan. Integrasi kebijakan pajak karbon dengan kerangka pelaporan ESG dan mekanisme penilaian keberlanjutan berbasis pasar modal dapat memperkuat sinyal kebijakan kepada pelaku usaha dan investor, sehingga mendorong peningkatan transparansi dan kualitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, studi mendatang dapat memperluas cakupan analisis dengan menggunakan data panel jangka panjang untuk menangkap dinamika respons perusahaan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan pajak karbon secara lebih eksplisit. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan variabel institusional lain, seperti tata kelola perusahaan, intensitas emisi, atau tekanan regulasi sektoral, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kebijakan lingkungan dalam membentuk strategi keberlanjutan perusahaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Athaya, N. S., Tamba, R. R., Safitri, T. N., Panjaitan, G. O., Manao, M. C., & Arnita, V. (2025). Pengukuran Emisi Karbon, Pelaporan Keberlanjutan, dan Pengungkapan Lingkungan terhadap Kinerja Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 341–351. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.385>

- Bellemare, M. F., Masaki, T., & Pepinsky, T. B. (2017). Lagged Explanatory Variables and the Estimation of Causal Effect. *The Journal of Politics*, 79(3), 949–963. <https://doi.org/10.1086/690946>
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and enviromental diclosures - a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gustanto, R., & Risman, A. (2025). Penggunaan Risiko Enviromental, Social, Governance Dalam Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Dalam Bisnis Berkelanjutan (Literature Review). *Realible Accounting Journal*, 4(2), 161–172. <https://doi.org/10.36352/raj.v4i2.973>
- Hartono, P. A. S., Lasmini, L., & Fatihah, D. I. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pnegungkapan Sustainability Reporting Pada Perusahaan Manufakturing Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 10(1), 43–65. <https://doi.org/10.32528/jiai.v10i1.3109>
- Indri L. L., D., Sari, I., Saputra, R. I. S., Sari, S. W., Yanti, R. D., & Sisdianto, E. (2023). Integrasi Akuntansi Lingkungan Untuk Kinerja Bisnis Dan Pertanggungjawaban Yang Komprehensif. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 244–254. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2370>
- Mubarok, A. H., & Widianingsih, R. (2025). Pengaruh kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) terhadap penilaian keberlanjutan perusahaan (CSA). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 80–86. <https://doi.org/10.24002/senapas.v3i1.12602>
- Pasaribu, M., & Soeratin, H. Z. (2024). Pengaruh Pengawasan Komite Audit terhadap Kualitas Pengungkapan ESG Perusahaan. *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN : 3063-8968, 1(2), 65–71. <https://doi.org/10.62379/jbem.v1i2.63>
- Putri, D. A., & Lismawati. (2024). Enviromental, Social, and Governance (ESG) Sebagai Faktor Utama Dalam Penilaian Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan: Pendekatan Regresi. *Edunomika*, 8(2), 1–11.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.

- S&P Global. (2025). *Corporate Sustainability Assessment*. Zurich.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulemana, I., Cheng, L., Agyemang, A. O., Osei, A., & Nagriwum, T. M. (2025). Stakeholders and sustainability disclosure: Evidence from an emerging market. *Sustainable Futures*, 9, 100445. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100445>
- Sulistiyanti, U., & Falikhatun, F. (2024). Carbon tax: A bibliometric analysis for future research in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 198–207. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss2.art8>
- Susanti, E., & Hindasah, L. (2025). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kinerja Sosial dan Mekanisme Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 9(1), 152–168. <https://doi.org/10.30738/ad.v9i1.19033>
- Wahyudi, I. (2017). CSR disclosure – legitimacy dan perubahan retorika. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 70–80. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art7>
- Wulandhari, K., & Machdar, N. M. (2024). Kontribusi Biaya Lingkungan, Green Accounting, CSR, dan Ukuran Perusahaan dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 3(1), 151–164. <https://doi.org/10.55606/jumia.v3i1.3552>